

**PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, AKUNTABILITAS PELAYANAN,
DAN SANKSI PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Kasus Pada Samsat Serpong)**

Lina Carolina ¹, Septian Arief Budiman ²

Program Studi Sarjana Akuntansi , Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Pamulang Tangerang Selatan

Correspondence		
Email: linacarolina1910@gmail.com	No. Telp:	
Submitted 19 Juli 2024	Accepted 22 Juli 2024	Published 29 Juli 2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Serpong tahun 2022. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer. Sampel yang dipakai sebanyak 100 orang responden. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan dianalisis menggunakan program SPSS versi 22. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis Statistik Deskriptif, Uji Kualitas Data, Uji Asumsi Klasik, dan Uji Hipotesis. Metode pengumpulan data menggunakan metode kuesioner dalam bentuk pertanyaan tertutup. Berdasarkan hasil yang diperoleh peneliti bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib. Sedangkan secara parsial akuntabilitas pelayanan dan sanksi pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di samsat Serpong.

Kata Kunci: Pengetahuan Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan, Sanksi Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

The problem in this research is whether understanding of taxation, tax services, perception of the effectiveness of the tax system and taxpayer awareness have an effect on taxpayer compliance. This research aims to determine the influence of understanding taxation, tax services, perceptions of the effectiveness of the taxation system and taxpayer awareness on taxpayer compliance at the Pratama Tax Service Office, Depok Sawangan. This type of research is a quantitative method uses primary data and the Slovin formula to determine the sample, so that the sample obtained is 100 taxpayers. The data collection method uses a survey method, namely the author distributes questionnaires directly. This research can explain the independent variables (understanding of taxation, tax services, perception of the effectiveness of the taxation system and awareness of taxpayers) which strengthen or weaken the dependent variable (taxpayer compliance). Based on the SPSS version 28 test results from the tests that have been carried out, the t test results show that understanding of taxation and perceptions of the effectiveness of the taxation system have a positive and significant influence on taxpayer compliance. Meanwhile, tax services and taxpayer awareness do not have a significant effect on taxpayer compliance.

Keywords: Understanding Taxation; Tax Services; Perception of Tax System Effectiveness; Taxpayer Awareness; Taxpayer Compliance.

1. PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara terbesar, maka harus dapat dikelola dengan baik agar penerimaan terlaksana dengan maksimal. Namun, mengingat banyaknya wajib pajak yang belum membayar kewajibannya, diharapkan wajib pajak mematuhi sehingga pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan daerahnya. Semua wilayah ingin memiliki PAD tertinggi. Pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah pajak yang dikenakan kepada individu yang memiliki dan menggunakan kendaraan bermotor, karena kendaraan bermotor adalah salah satu kendaraan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang dikenakan pajak berdampak signifikan pada peningkatan pendapatan pajak daerah.

Salah satu faktor yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) adalah kepatuhan wajib pajak. Setiap orang harus menyadari bahwa dengan patuh dalam

menyelesaikan kewajiban perpajakannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Masalah kepatuhan wajib pajak merupakan masalah yang sering muncul bagi negara maju dan berkembang seperti Indonesia, antara lain masalah yang sering muncul yaitu dimana wajib pajak masih tidak mematuhi kewajiban perpajakannya dengan melakukan tindakan-tindakan seperti penghindaran, pengelakan, dan kelalaian pajak. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak merupakan faktor terpenting dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor yang dimiliki.

Apabila permasalahan ini masih terus berlanjut, maka nantinya akan berakibat pada penurunan penerimaan negara dari sektor pajak. Dengan diberikannya pelayanan yang baik bagi setiap wajib pajak maka dapat meningkatkan kualitas layanan dan membuat wajib pajak merasa puas dalam memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sistem administrasi manunggal satu atap atau biasa disebut dengan istilah (SAMSAT) merupakan sistem administrasi yang saling terikat dalam menjalin kerjasama secara terpadu, antara Dinas Pendapatan Provinsi, Polri, dan PT. Jasa Raharja (Persero). Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu yang berada di Provinsi Banten dan memiliki banyak jumlah kendaraan bermotor karena banyak masyarakat menggunakannya untuk kegiatan sehari-hari.

Tabel 1. 1 Data Tunggalan Wajib Pajak UPT Serpong Periode 2018-2022 Pada Kendaraan Bermotor

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Tidak Melakukan Daftar Ulang	Persentase Pelanggaran PKB Pada Kendaraan Bermotor
2018	169.883	96.285	57%
2019	184.441	104.797	57%
2020	177.735	91.173	51%
2021	185.616	65.457	44%
2022	174.800	84.974	48%

Sumber Data: Kantor Samsat Serpong (2022)

Terkait tabel 1.1 Bisa dilihat bahwa jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar pada tahun 2018 adalah 169.883, tetapi 96.285 tidak didaftarkan, menunjukkan 57% pelanggaran PKB. Jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar pada tahun 2019 adalah 184.441, tetapi 104.797 tidak didaftarkan, menunjukkan 57% pelanggaran PKB. Pada tahun 2020, 177.735 kendaraan bermotor terdaftar, tetapi 91.173 tidak didaftarkan, menunjukkan 51% pelanggaran PKB. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa masih sangat tinggi tingkat pelanggaran pajak kendaraan bermotor yang berada di Samsat Serpong dari tahun ke tahunnya.

Salah satu tugas pelayanan publik atau pemerintah adalah mengatur pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB). Salah satu organisasi pemerintah yang menangani langsung pelayanan pajak kendaraan bermotor adalah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat). Samsat adalah salah satu badan publik yang secara langsung berurusan dengan pelayanan pajak kendaraan bermotor (PKB). Samsat Serpong berinovasi dalam penawaran layanannya setiap tahun untuk mengikuti perubahan kebutuhan pasar, samsat Serpong menawarkan layanan pembayaran pajak digital samsat melalui mobile aplikasi dan datang secara langsung. Beberapa samsat keliling saat ini sudah beroperasi di Kota Tangerang Selatan dan dapat membantu mengurangi antrean panjang wajib pajak kendaraan bermotor. Tujuan diadakannya samsat keliling di Samsat Serpong juga karena pemerintah ingin menyediakan layanan yang lebih dekat dengan masyarakat.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan terhadap wajib pajak kendaraan bermotor adalah pengetahuan yang dimiliki tentang wajib pajak. Karena kita lebih cenderung akan patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Akibatnya, semakin banyak informasi yang dimiliki wajib pajak, maka semakin baik dalam memahami tanggung jawab pajak mereka saat ini serta hukuman pajak yang mereka hadapi karena melanggar aturan membayar pajak mereka sesuai kondisi yang ditetapkan secara bebas. Sebaliknya, semakin kita kurang sadar akan kebutuhan membayar pajak kendaraan bermotor, semakin kurang pemahaman yang kita miliki tentang pajak. Pengetahuan wajib pajak berisikan semua informasi yang terkait dengan dengan tata cara dan juga ketentuan perpajakan yang berlaku.

Menurut Winasari (2020:13) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Subang. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arnanto (2017) yang menyimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman pajak wajib pajak tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Asis (2017:10) menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Peneliti termotivasi untuk menguji kembali hubungan terkait variabel pengetahuan wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akibat adanya perbedaan pada temuan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh masing-masing peneliti.

Akuntabilitas pelayanan merupakan faktor kedua yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Akuntabilitas pelayanan merupakan pendekatan baru untuk mengatasi persepsi masyarakat tentang layanan yang diinginkannya dan layanan yang ditawarkan oleh pemerintah daerah, Mahaputri & Noviani (2016, hal 2329). Selain itu, layanan yang ditawarkan dirancang untuk menjunjung tinggi kepuasan masyarakat, yang pada akhirnya membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawab pajak kendaraan bermotor mereka. Kualitas pelayanan yang diberikan akan mempengaruhi penerimaan pajak di tahun berikutnya, dan buruknya kualitas pertanggungjawaban yang diberikan akan membuat wajib pajak merasa terbebani dan lambat dalam memenuhi kewajiban tugasnya. Tergantung pada seberapa baik petugas melayani wajib pajak saat ini, setiap wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu para aparat pajak harus memperbaiki mutu pelayanan yang sudah ada supaya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian yang dilakukan oleh Aswati,dkk. (2018:38) menyatakan bahwa akuntabilitas pelayanan publik tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryani & Julian (2022:42) yang menyatakan jika akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari penelitian terdahulu yang sudah ada dengan hasil yang berbeda-beda maka penulis ingin mengevaluasi kembali hubungan antara akuntabilitas pelayanan dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor berdasarkan penelitian sebelumnya.

Sanksi perpajakan merupakan faktor lain yang mempengaruhi dalam kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi merupakan suatu alat yang digunakan untuk mencegah wajib pajak supaya tidak melanggar aturan dalam perpajakan, khususnya bagi pajak kendaraan bermotor. Sanksi diberikan kepada masing-masing wajib pajak kendaraan supaya jera dan membuatnya menjadi lebih disiplin lagi perihal membayar pajak kendaraannya sendiri. Pemberian sanksi ini diberikan supaya para wajib pajak mau belajar dari kesalahan yang telah dilakukannya sehingga mau memenuhi kewajiban perpajakan di masa yang akan datang dan menjadi lebih baik lagi. Ada dua jenis sanksi dalam pajak yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Pembayaran kerugian kepada negara sebagai akibat dari hukuman administratif termasuk bunga dan kenaikan yang dihasilkan dari keterlambatan pembayaran pajak.

Sedangkan untuk sanksi pidana dalam perpajakan berupa penderitaan atau siksaan dalam hal pelanggaran pajak. Melalui penelitian yang dilakukan oleh Puteri et al., (2019, hal 1585) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dapat kita lihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan latar belakang dan juga penelitian terdahulu yang disampaikan oleh para penulis melalui jurnalnya, terdapat beberapa variabel yang sudah banyak diteliti. Pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan dijadikan sebagai variabel independen karena variabel ini sudah cukup banyak diteliti dan hasilnya selalu berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini buktikan dengan semakin tinggi pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selain itu, penelitian yang disebutkan di atas terus menghasilkan temuan yang tidak konsisten. Penelitian ini berfokus pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang ada di Samsat Serpong karena fakta bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak tidak selalu meningkat meskipun jumlah kendaraan bermotor meningkat. Peneliti berminat melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan, dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Samsat Serpong)”**.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode asosiatif. Menurut Sugiyono (2022:15) penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif maupun statistik, yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang sudah ditetapkan. Metode asosiatif menurut Sugiyono (2019:65) sebuah metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Metode asosiatif merupakan rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian metode asosiatif digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh variabel independen yang terdiri atas Pengetahuan Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen.

Data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah data primer. Menurut Sugiyono (2021:193) sumber utama data primer adalah data yang langsung di berikan oleh responden kepada pengumpul data. Menurut Arikunto (2013:172) data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak dan lain-lain. Dari teori yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung oleh pengumpul data dengan melalui wawancara, kuesioner dan lain-lain.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

3.1.1 Profil UPTD PPD Samsat Serpong

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) adalah serangkaian kegiatan yang mencakup administrasi yang dapat membantu masyarakat dalam hal membayar kewajiban pajak mereka. Bagian dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten yaitu UPTD PPD juga dikenal sebagai SAMSAT. SAMSAT adalah sistem kerjasama terpadu antara Kepolisian Republik Indonesia, Badan Pendapatan, dan PT. Jasa Raharja (Persero). Memberikan layanan untuk menerbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda

Nomor Kendaraan Bermotor, yang kemudian dikaitkan ke kas negara melalui pajak kendaraan bermotor (PKB), dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Dalam melaksanakan tugasnya Samsat Serpong mengacu kepada Perpres RI No.5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Satu Atap Kendaraan Bermotor dan Intruksi Bersama No. INS/03/M/X/1999 dari Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan, kemudian No. 29 Tahun 1999, No.6/IMK.014/1999, terkait Pelaksanaan Samsat dalam menerbitkan STNK, TNBK, PKB, BBN-KB, maupun SWDKLLJ, secara rincinya tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero) No. SKEP/06/X/1999, No. 973-1228, dan SKEP/02/X/1999, serta Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Banten No. 19 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten. Kantor SAMSAT memiliki satu gedung yang memiliki 2 (dua) lantai dan 1 (satu) Gedung pendukung diantaranya ialah :

a. Lantai 1

1. Ruang pendaftaran, pengesahan dan perpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
2. Ruang Pendaftaran Bea Balik Nama (BBN) I dan Bea Balik Nama (BBN) II
3. Ruang pendaftaran mutasu keluar daerah
4. Ruang jasa raharja
5. Ruang fiskal antar daerah atau tunggakan pajak
6. Ruang SAMSAT Online DKI Jakarta dan JABAR

b. Lantai 2

1. Ruang Kepala Unit Pelaksana Teknis
2. Ruang Tata Usaha dan Kepegawaian
3. Ruang pembayaran Pendapatan Lain-Lain

c. Gedung Pendukung

1. Ruang Tata Usaha Kepolisian dan Arsip
2. Ruang Cek fisik Kendaraan
3. Ruang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)

Cakupan kewenangan kantor SAMSAT Serpong dalam bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor meliputi :

1. Pendaftaran Bea Balik nama Pertama / BBN I mencakup :
 - a. Pendaftaran kendaraan baru
 - b. Pendaftaran kendaraan eks luar daerah
 - c. Pendaftaran kendaraan eks Dump TNI/ POLRI
 - d. Pendaftaran kendaraan eks lelang / putusan pengadilan
2. Pendaftaran Bea Balik Nama Kedua dan Setersunya / BBN II mencakup :
 - a. Pendaftaran kendaraan tukar nama
 - b. Rubah bentuk
 - c. Ganti warna
 - d. Ganti nopol
 - e. Pindah alamat
 - f. Pendaftaran kendaraan mutasi keluar daerah
3. Pendaftaran kendaraan mutasi keluar daerah
4. Pelayanan cek fisik kendaraan bermotor
5. Perpanjang STNK 5 tahun
6. Pengesahan STNK setiap 1 tahun

3.1.2 Visi dan Misi

a. Visi UPT Serpong

Terwujudnya layanan prima demi kepuasan masyarakat.

b. Misi UPT Serpong

1. Memberikan layanan yang cepat, tepat, dan akurat kepada wajib pajak untuk mengelola Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Menyelenggarakan tertib administrasi dokumen secara baik dan benar dalam rangka menjamin kepemilikan dan identitas data kendaraan bermotor.
3. Menyediakan data untuk bahan informasi mengenai identitas kepemilikan kendaraan bermotor yang diperlukan untuk proses pengambilan keputusan.
4. Meningkatkan layanan melalui perbaikan prasarana dan sarana, pengembangan sistem komputerisasi, dan peningkatan sumber daya manusia.
5. Meningkatkan Pendapatan Daerah
6. Meningkatkan Kepuasan Publik

3.1.3 Struktur Organisasi

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi
Struktur Organisasi UPTD PPD Serpong



3.1.4 Tugas dan Fungsi

Tugas utama dari Samsat Serpong yaitu melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada bidang pengelolaan pendapatan daerah yang meliputi pendataan dan penetapan, penerimaan, dan penagihan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut maka fungsi dari adanya Samsat Serpong yaitu sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah.
2. Penyelenggaraan pengelolaan pendapatan daerah yang meliputi pendataan dan penetapan, penerimaan, dan penagihan.
3. Penyelenggaraan dan evaluasi serta pelaporan P3D
4. Melaksanakan fungsi tambahan sesuai dengan Tupoksi yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Tugas Pokok, Gungsi,

Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Bapenda Provinsi Jawa Barat.

3.1.5 Informasi Responden

Adapun yang menjadi sampel dari penelitian ini yaitu sebanyak 100 responden dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden atau wajib pajak kendaraan bermotor yang bersedia untuk mengisi dan menjawab pertanyaan yang ada pada lembar kuesioner yang diberikan, dimana kuesioner yang ada disebarkan di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Serpong. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *accidental sampling*.

Tabel 3.1 Distribusi Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	100	100%
Kuesioner yang kembali	100	100%
Kuesioner yang tidak kembali	0	0

Sumber : Data diolah penulis, 2024

Kesimpulannya adalah jumlah kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 orang wajib pajak yang terdaftar. Responden dalam penelitian ini dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok sebagai berikut:

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berikut adalah data responden berdasarkan jenis kelamin wajib pajak sebagai berikut:

Tabel 3.2 Demografi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Jumlah Laki-laki	54	54%
Jumlah Perempuan	46	46%
Jumlah	100	100%

Sumber : Data diolah penulis, 2024

Berdasarkan tabel 3.2 menunjukkan bahwa jenis kelamin wajib pajak kendaraan bermotor yang menjadi responden dalam penelitian ini terdiri dari 54% responden berjenis kelamin laki-laki, 46% responden berjenis kelamin perempuan.

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Tabel 3.3 Persentase Usia Responden

Usia	Frekuensi	Persentase (%)
< 20 tahun	3	3%
20 – 30 tahun	60	60%
30- 40 tahun	19	19%
> 40 tahun	18	18%
Jumlah	100	100%

Sumber: Data diolah penulis, 2024

Profil usia para responden dalam penelitian ini mencerminkan keragaman generasi yang sangat signifikan. Dimana sebanyak 3 responden (3%) berada dalam rentang usia < 20

tahun, menunjukkan keikutsertaan dalam membayar pajak kendaraan yang dimiliki. Sementara itu, kelompok usia 20 – 30 tahun menyumbang sebanyak 60 responden (60%) yang menunjukkan partisipasi paling kuat dan banyak dari usia muda. Kelompok usia 30 – 40 tahun memiliki persentase responden sebanyak 19 orang (19%) menunjukkan keikutsertaannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dan yang terakhir kelompok usia > 40 tahun sebanyak 18 responden (18%) walaupun sudah dalam rentang usia yang lebih matang, tetapi masih memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan yang dimiliki. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas dari responden yang ada berada pada fase perkembangan awal dan dewasa, yang dapat mempengaruhi terhadap topik penelitian yang ada.

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel 3. 4 Persentase Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase (%)
SD	1	1%
SMP	3	3%
SMA	64	64%
D3	12	12%
S1	16	16%
Lainnya	4	4%
Jumlah	100	100%

Sumber : Data diolah penulis, 2024

Berdasarkan tabel 3.4 menunjukkan bahwa jenjang pendidikan para wajib pajak kendaraan bermotor yang menjadi responden dalam penelitian yang dilakukan ini yaitu terdiri dari 1% responden yang berpendidikan terakhir SD, 3% responden yang berpendidikan terakhir SMP, 64% responden berpendidikan terakhir SMA, 12% responden yang berpendidikan terakhir D3, 16% responden yang berpendidikan terakhir S1, dan 4% responden yang berpendidikan terakhir lainnya. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak yang menjadi responden dalam penelitian ini mayoritas memiliki pendidikan terakhir SMA.

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Tabel 3.5 Persentase Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Frekuensi	Persentase (%)
Tidak Bekerja	9	9%
PNS	5	5%
Pegawai Swasta	39	39%
Lainnya	47	47%
Jumlah	100	100%

Sumber : Data diolah penulis, 2024

Pada tabel diatas, dalam menganalisis karakteristik responden skripsi ini menunjukkan bahwa jenis pekerjaan wajib pajak kendaraan bermotor memiliki keragaman yang terdiri dari 9% responden tidak bekerja, 5% responden bekerja sebagai PNS, 39% responden bekerja sebagai pegawai swasta, dan 47% responden bekerja dipekerjaan lainnya. Dari hasil ini dapat dilihat bahwa mayoritas pekerjaan dari wajib pajak yang menjadi responden dalam penelitian ini yaitu bekerja di lainnya.

3.2 Hasil Penelitian

3.2.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif ini menggunakan nilai mean (rata-rata), maksimum, minimum, dan standar deviasi dari jawaban responden untuk masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Tujuan dari analisis deskriptif ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Di bawah ini merupakan hasil dari analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini:

Tabel 3.6 Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Wajib Pajak	100	13	24	18,93	2,559
Akuntabilitas Pelayanan	100	14	24	18,71	2,463
Sanksi Pajak	100	14	24	19,22	2,444
Kepatuhan Wajib Pajak	100	15	24	19,91	2,349
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data yang diolah penulis pada SPSS 22, 2024

Rata-rata hitung dan standar deviasi dari masing-masing variabel yang telah ditampilkan pada tabel 3.6 yaitu sebagai berikut:

1. Untuk variabel pengetahuan wajib pajak (X1), rata-rata hitung menunjukkan bahwa jawaban minimum responden adalah 13, nilai maksimum adalah 24, dan nilai mean adalah 18,93. Standar deviasi, atau perbedaan jawaban antar responden, adalah 2,559.
2. Pada variabel akuntabilitas pelayanan (X2), rata-rata hitung menunjukkan nilai minimum 14, nilai maksimum 24, dan nilai mean 18,71. Standar deviasi, atau perbedaan jawaban antar responden, adalah 2,463.
3. Variabel sanksi pajak (X3) memiliki nilai rata-rata hitung 14, nilai maksimum 24, dan nilai mean 19,22. Standar deviasi, atau perbedaan jawaban antar responden, adalah 2,444.
4. Variabel kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki rata-rata hitung yang menunjukkan bahwa jawaban minimum dari responden adalah 15, jawaban maksimum adalah 24, dan nilai mean adalah 19,91, yang menunjukkan bahwa semua responden memberikan jawaban yang berkaitan dengan variabel tersebut. Standar deviasi, juga dikenal sebagai perbedaan jawaban antar responden, adalah 2,349. Jika standar deviasi kurang dari rata-rata maka data terdistribusi dengan baik atau deviasi minimal. Rata-rata menunjukkan bahwa responden percaya tingkat kepatuhan wajib pajak telah diterapkan dengan benar.

3.2.2 Uji Kualitas Data

Suatu kuesioner dianggap layak atau tidak digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian, setiap pertanyaan harus diuji terlebih dahulu. Penulis penelitian ini menggunakan program dari IBM SPSS *Statistic* 22 untuk menguji validitas dan reliabilitas. Dimana data yang digunakan bersumber dari hasil kuesioner yang sudah dibagikan kepada para responden, kemudian dihitung dan juga dianalisis.

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menentukan validitas instrumen penelitian yang sedang digunakan. Jika instrumen dapat mengungkapkan data dari variabel yang telah diteliti secara tepat, dan jika semua R-Hitung lebih besar dari R-Tabel, maka instrumen dianggap valid.

Dalam studi ini, 100 sampel (N) akan diuji, dengan taraf signifikan dua arah 0,05 dan ketentuan $df = 100 - 2 = 98$, sehingga R Tabel adalah 0,195. Lihat nilai signifikan. Nilai signifikan yang kurang dari 0,05 dan nilai korelasi Pearson yang lebih besar dari 0,3 menunjukkan bahwa instrumen penelitian tidak valid.

Tabel 3.7 Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X1)

Item	R-hitung	R-tabel	Interpretasi
1	0,722	0,195	Valid
2	0,724	0,195	Valid
3	0,795	0,195	Valid
4	0,753	0,195	Valid
5	0,766	0,195	Valid
6	0,708	0,195	Valid

Sumber : Data yang diolah penulis pada SPSS 22, 2024

Semua indikator yang digunakan untuk variabel pengetahuan wajib pajak adalah valid, seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.7. Ini disebabkan oleh uji validitas yang menunjukkan bahwa nilai *person correlation* lebih besar daripada r hitung saat ini, yaitu 0,195, dan signifikansinya lebih kecil dari 0,005. Nilai tertinggi pernyataan X1.3 adalah 0,795, dan nilai terendah pernyataan X1.6 adalah 0,708. Dengan demikian, hasil uji validitas yang sudah dilakukan dapat disimpulkan pada tabel 4.7, yang menunjukkan bahwa semua pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid dan dapat diandalkan untuk mengambil data penelitian.

Tabel 3.8 Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas Pelayanan (X2)

Item	R-hitung	R-tabel	Interpretasi
1	0,807	0,195	Valid
2	0,813	0,195	Valid
3	0,834	0,195	Valid
4	0,796	0,195	Valid
5	0,765	0,195	Valid
6	0,760	0,195	Valid

Sumber : Data yang diolah penulis pada SPSS 22, 2024

Semua indikator yang digunakan untuk variabel akuntabilitas pelayanan valid, seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.8, karena uji validitas menunjukkan bahwa nilai korelasi lebih besar daripada r hitung, yaitu 0,195, dan signifikansinya lebih kecil dari 0,005. Nilai-nilai pernyataan X2.3, yang memiliki nilai tertinggi sebesar 0,834, dan X2.6, yang memiliki nilai terendah sebesar 0,760.

Tabel 3.9 Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Pajak (X3)

Item	R-hitung	R-tabel	Interpretasi
1	0,731	0,195	Valid
2	0,798	0,195	Valid
3	0,665	0,195	Valid
4	0,799	0,195	Valid
5	0,758	0,195	Valid
6	0,770	0,195	Valid

Sumber : Data yang diolah penulis pada SPSS 22, 2024

Berdasarkan pada tabel 3.9 menunjukkan bahwa semua indikator yang digunakan pada variabel sanksi pajak dinyatakan valid, hal ini karena pada uji validitas menunjukkan bahwa nilai *person correlation* lebih besar dibandingkan dengan *r* hitung yang ada yaitu 0,195 dan signifikansinya lebih kecil dari 0,005. Dari penjelasan tabel diatas dapat dilihat bahwa yang memiliki validitas tertinggi merupakan pernyataan X3.4 sebesar 0,799 dan yang memiliki nilai terendah yaitu X3.3 sebesar 0,665. Maka dapat disimpulkan hasil pada tabel 4.9 uji validitas yang sudah dilakukan menyatakan bahwa seluruh pernyataan pada kuesioner dinyatakan valid dan dapat dipercaya untuk mengambil data penelitian.

Tabel 3.10 Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Item	R-hitung	R-tabel	Interpretasi
1	0,583	0,195	Valid
2	0,695	0,195	Valid
3	0,699	0,195	Valid
4	0,609	0,195	Valid
5	0,677	0,195	Valid
6	0,601	0,195	Valid

Sumber : Data yang diolah penulis pada SPSS 22, 2024

Berdasarkan tabel 3.10, pernyataan Y.3 memiliki nilai tertinggi sebesar 0,699 dan pernyataan Y.1 memiliki nilai terendah sebesar 0,58. Ini menunjukkan bahwa semua indikator yang digunakan untuk variabel kepatuhan wajib pajak adalah valid karena uji validitas menunjukkan bahwa nilai *person correlation* lebih besar daripada *r* hitung, yaitu 0,195, dan signifikansinya kurang dari 0,005. Oleh karena itu, hasil uji validitas yang telah dilakukan, yang dapat disimpulkan pada tabel 4.10, menunjukkan bahwa semua pernyataan dalam kuesioner valid dan dapat diandalkan sebagai sumber data penelitian.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengevaluasi tingkat konsistensi dari setiap indikator yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga setiap indikator dianggap reliabel. Sebuah uji reliabilitas dianggap reliabel jika nilai *Alpha Cronbach* > 0,60. Uji reliabilitas ini digunakan untuk menentukan apakah pengetahuan wajib pajak, akuntabilitas pelayanan, dan sanksi pajak berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Serpong saat ini. Berikut adalah tabel hasil uji reliabilitas yang sudah dilakukan:

Tabel 3.11 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Pengetahuan Wajib Pajak (X ₁)	0,836	Reliabel
Akuntabilitas Pelayanan (X ₂)	0,880	Reliabel
Sanksi Pajak (X ₃)	0,836	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,768	Reliabel

Sumber : Data yang diolah penulis pada SPSS 22, 2024

Berdasarkan tabel 3.11 dapat dilihat bahwa variabel pengetahuan wajib pajak (X₁) memiliki nilai *cronbach's alpha* lebih dari 0,60 (0,836 > 0,60), akuntabilitas pelayanan (X₂) memiliki nilai *cronbach's alpha* lebih dari 0,60 (0,880 > 0,60), sanksi pajak (X₃) memiliki nilai *cronbach's alpha* lebih dari 0,60 (0,836 > 0,60), kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai *cronbach's alpha* lebih dari 0,60 (0,768 > 0,60). Hal ini dapat disimpulkan bahwa semua

variabel (Pengetahuan Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan, Sanksi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak) dinyatakan reliabel karena mempunyai nilai *cronbach's alpha* diatas 0,60 dan data dapat digunakan sebagai alat ukur pengujian.

3.2.3 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independen dan dependennya berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas data menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* dalam program aplikasi SPSS 22 dengan taraf probabilitas (sig) 0,05. Kriteria pengujian uji Kolmogorov-Smirnov adalah :

- Jika nilai signifikan < 0,05 maka distribusi data tidak normal.
- Jika nilai signifikan > 0,05 maka distribusi data normal.

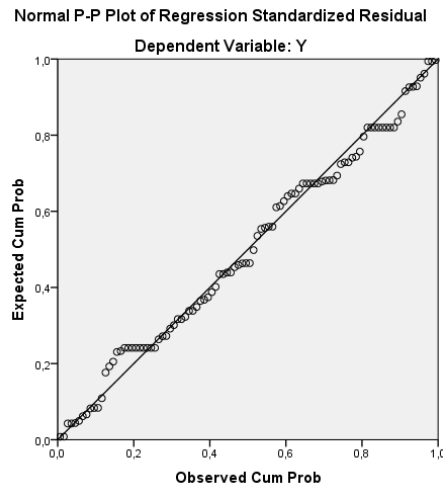
Tabel 3.12 Uji Hasil Normalitas One Sample Kolmogorov-Smirnov test Monte Carlo

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,82593457
Most Extreme Differences	Absolute	,077
	Positive	,066
	Negative	-,077
Test Statistic		,077
Asymp. Sig. (2-tailed)		,149 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber : Data yang diolah penulis pada SPSS 22, 2024

Berdasarkan tabel 3.12 hasil uji normalitas untuk *one sample Kolmogorov-smirnov test* 100 sampel dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar 0,149 syarat untuk lulus uji normalitas adalah nilai signifikan > 0,05, sehingga nilai residual terdistribusi secara normal. Dari hasil uji normalitas yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa nilai residual dalam model regresi berdistribusi normal. Oleh karena itu, model regresi layak untuk dilakukan uji analisis selanjutnya. Untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal, peneliti juga dapat menggunakan grafik P-Plot regresi statistik normal. Dimana kondisi garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Dasar pengambilan keputusan dari analisis normal *probability plot* adalah sebagai berikut:

- Jika titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- Jika titik menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.



Gambar 3.2 Hasil Uji Normalitas (Grafik P-Plot Of Regression Statistic)

Berdasarkan gambar 3.2 dapat dilihat bahwa titik-titik yang ada pada gambar mayoritas menyebar mengikuti garis diagonal, dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas yang berarti kesalahan gangguan berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dipakai dalam melakukan pengujian apakah model regresi mendeteksi antar variabel penelitian yang ada saling berkorelasi. Model regresi yang baik tidak memiliki hubungan diantara variabel bebasnya. Uji multikolinearitas dapat terlihat dari nilai tolerance dan VIF. Jika nilai toleransi diatas dari 0,10 serta nilai VIF < 10, kemudian tidak terjadi multikolinearitas pada data yang diuji. Adapun hasil dari uji multikolinearitas sebagai berikut:

Tabel 3.13 Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pengetahuan Wajib Pajak	,460	2,172
	Akuntabilitas Pelayanan	,520	1,924
	Sanksi Pajak	,471	2,122
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak			

Sumber : Data yang diolah penulis pada SPSS 22, 2024

Menurut hasil uji multikolinearitas, tabel variabel independen memiliki nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) di bawah 10, yaitu pengetahuan wajib pajak bernilai 2,172, akuntabilitas pelayanan bernilai 1,924, dan sanksi pajak bernilai 2,122. Demikian juga, untuk nilai *tolerance* di atas 0,10, *tolerance* untuk pengetahuan wajib pajak bernilai 0,460, nilai *tolerance* untuk akuntabilitas pelayanan bernilai 0,520, dan *tolerance* untuk sanksi pajak bernilai 0,471. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antara variabel bebas atau independen, seperti yang ditunjukkan secara keseluruhan dalam penjelasan tabel 3.13.

3. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah ada ketidaksamaan dalam varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya dalam model regresi. Metode uji Glejser untuk menentukan apakah heteroskedastisitas terjadi atau tidak. Untuk mendeteksi ada

tidaknya heteroskedastisitas dilihat dari nilai probabilitas setiap variabel independen. Dengan dasar analisis sebagai berikut :

- a. Jika Probabilitas > 0,05 berarti tidak terjadi heteroskedastisitas,
- b. Jika Probabilitas < 0,05 berarti terjadi heteroskedastisitas.

Selain itu, untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat atau dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID.

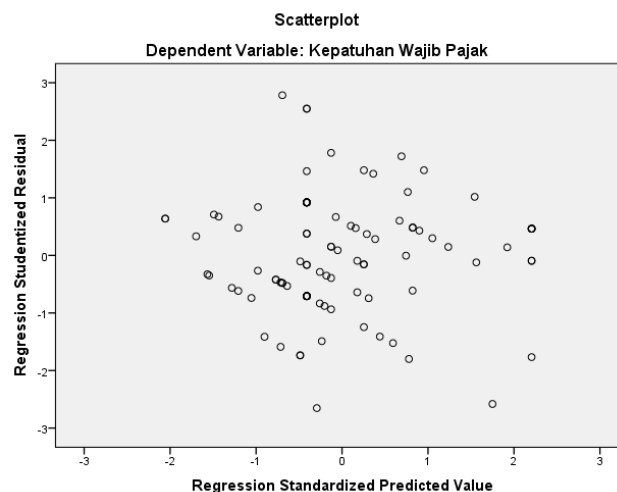
Tabel 3.14 Hasil Uji Heterokedastisitas (Glejser Test)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,020	,995		2,030	,045
	Pengetahuan Wajib Pajak	,014	,065	,033	,218	,828
	Akuntabilitas Pelayanan	-,078	,064	-,172	1,223	,224
	Sanksi Pajak	,032	,068	,069	,466	,642

a. Dependent Variable: Abs_RES

Sumber : Data yang diolah penulis pada SPSS 22, 2024

Berdasarkan tabel 3.14 hasil yang sudah dilakukan uji dapat dilihat bahwa pengetahuan wajib pajak memiliki signifikan 0,828 lebih besar dari 0,05 ($0,828 > 0,05$), akuntabilitas pelayanan memiliki signifikan 0,224 lebih besar dari 0,05 ($0,224 > 0,05$) serta sanksi pajak memiliki signifikan 0,642 lebih besar dari 0,05 ($0,642 > 0,05$). Sehingga data dikatakan tidak terjadi heterokedastisitas karena semua variabel independent memiliki signifikansi diatas 0,05 atau 5%. Selain dengan menggunakan uji glejser pengujian heterokedastisitas bisa menggunakan gambar scatterplot dari model penelitian ini yang disajikan pada gambar berikut:



Sumber : Data yang diolah penulis pada SPSS 22. 2024

Gambar 3.3 Hasil Uji Heterokedastisitas (Metode Scatterplot)

Berdasarkan gambar 3.3 dapat dilihat bahwa titik-titik yang ada tidak menyebar secara acak, serta ada beberapa titik-titik yang bertumpuk sehingga dapat dikatakan bahwa data yang digunakan tidak lolos uji heterokedastisitas.

3.2.4 Uji Hipotesis

1. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini dilakukan supaya mengetahui korelasi fungsional di antara variabel bebas dan terikat. Model regresi berganda ini bertujuan untuk memprediksi besar variabel dependen dengan menggunakan data variabel independen yang sudah diketahui besarnya. Berikut adalah hasil uji regresi linier berganda yang dilakukan dalam penelitian ini:

Tabel 4.15 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7,707	1,636		4,711	,000
	Pengetahuan Wajib Pajak	,419	,107	,457	3,905	,000
	Akuntabilitas Pelayanan	,112	,105	,118	1,069	,288
	Sanksi Pajak	,113	,111	,118	1,018	,311

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data yang diolah penulis pada SPSS 22, 2024

Berdasarkan tabel 3.15 telah ditemukan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

$$Y = 7,707 + 0,419 X_1 + 0,112 X_2 + 0,113 X_3 + \varepsilon$$

Berdasarkan model regresi persamaan diatas, maka kesimpulan yang dapat diambil dari hasil uji regresi linear berganda dalam penelitian yaitu:

1. Nilai konstanta adalah 7,707 hasil ini dapat diartikan apabila besarnya nilai seluruh variabel independen yaitu pengetahuan wajib pajak, akuntabilitas pelayanan, dan sanksi pajak dianggap bernilai 0, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor bernilai 7.707 .
2. Koefisien regresi variabel pengetahuan wajib pajak (X1) sebesar 0,419 dan bernilai positif menunjukkan bahwa hubungan antar variabel bersifat searah. Artinya ketika variabel X meningkat maka variabel Y juga meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan pengetahuan wajib pajak maka variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan sebesar 0,419 dengan asumsi variabel lain tetap.
3. Koefisien regresi variabel tanggung jawab pelayanan (X2) sebesar 0,112 dan nilai positif menunjukkan bahwa korelasi antar variabel tersebut searah. Artinya semakin besar X maka variabel Y juga semakin besar. Hal ini menunjukkan bahwa dengan asumsi seluruh variabel lainnya tetap, maka setiap peningkatan akuntabilitas pelayanan yang diberikan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan sebesar 0,112.
4. Koefisien regresi variabel sanksi pajak (X3) sebesar 0,113 dan bernilai positif menunjukkan bahwa hubungan antar variabel tersebut bersifat searah. Artinya ketika X meningkat maka variabel Y juga meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa dengan asumsi semua variabel lain

tetap, maka kewajiban pajak wajib pajak kendaraan bermotor meningkat sebesar 0,113 untuk setiap kenaikan pajak yang dikenakan.

2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi dilakukan dengan tujuan mengukur seberapa jauh model dalam menerangkan variabel dependen dan nilai koefisien serta untuk menguji keeratan antara korelasi diantara variabel bebas dan variabel terikatnya. Dimana nilai R^2 berada diantara 0-1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Nilai R^2 yang kecil mengandung arti bahwa kemampuan pada variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi-variabel dependen yang sangat terbatas. Namun jika nilainya mendekati satu, maka variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Berikut adalah hasilnya:

Tabel 3.16 Hasil Uji Koefisein Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,629 ^a	,396	,377	1,854
a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan, Pengetahuan Wajib Pajak				

Sumber : Data yang diolah penulis pada SPSS 22, 2024

Menurut Rifkhan (2022) diketahui bahwa makin baik estimasi model dalam menggambarkan data, maka semakin dekat nilai r^2 ke nilai 1 (satu) yaitu tingkat hubungan sempurna antara variabel bebas dengan variabel terikat, selain itu antara nilai *R-squared* dan nilai *Adjusted R Squared* hanya dibedakan pada nilai yang sudah terkoreksi dengan *standard error* yang telah ditetapkan sebelumnya, dan kedua nilai tersebut dapat dijadikan sebagai interpretasi hasil. Semakin besar persentasenya kearah nilai 100% maka semakin besar juga pengaruh dari keseluruhan variabel bebas terhadap variabel terikat yang digunakan dalam penelitian (Rifkhan, 2023).

Dari tabel diatas besarnya *R Square* adalah 0,396. Hal ini mengindikasi bahwa kontribusi anantara variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y sebesar 39,6%, sedangkan 60,4% ditentukan oleh faktor lain diluar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini.

3. Uji Regresi Secara Simultan (Uji F)

Tujuan dilakukannya uji F ini yaitu untuk menentukan apakah seluruh variabel bebas yang ada mempunyai pengaruh yang sama terhadap variabel terikat. Dimana pengambilan keputusan ini dibuktikan dengan melihat nilai signifikansi, cara yang digunakan adalah dengan membandingkan Fhitung dengan Ftabel pada taraf signifikansi $(0,05) = 5\%$. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.17 Hasil Uji Regresi Secara Simultan (Uji F)

Sumber : Data yang diolah penulis pada SPSS 22, 2024

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	216,120	3	72,040	20,953	,000 ^b
	Residual	330,070	96	3,438		
	Total	546,190	99			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan, Pengetahuan Wajib Pajak

Nilai Fhitung di atas dibandingkan dengan Ftabel distribusi F, dimana nilai Ftabel pada probabilitas 0,05 dengan $df = n - k - 1 = 100 - 3 - 1 = 96$ adalah 2,70. Nilai F hasil perhitungan di atas yaitu 20,953 lebih besar dari Ftabel 2,70 dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05.

Hasil pengolahan data pada tabel di atas menunjukkan hasil F hitung sebesar 20,953 dengan nilai signifikan pada 0,000 ($sig\ 0,000 < 0,05$). Tingkat signifikansi lebih kecil dibanding 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Y atau dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Hal ini menunjukkan bahwa persamaan regresi yang didapatkan dapat diandalkan atau model yang digunakan sudah benar. Hal ini berarti bahwa variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat secara bersama-sama. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak, akuntabilitas pelayanan, dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Uji Regresi secara Parsial (Uji T)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen terdapat pengaruh terhadap variabel dependen. Jika nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel dan nilai $sig\ t < 0,05$ maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji t dapat dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikansi t masing-masing variabel. Hasil dari pengujian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.18 Hasil Uji Regresi Secara Parsial (Uji T)

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7,707	1,636		4,711	,000
	Pengetahuan Wajib Pajak	,419	,107	,457	3,905	,000
	Akuntabilitas Pelayanan	,112	,105	,118	1,069	,288
	Sanksi Pajak	,113	,111	,118	1,018	,311

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data yang diolah penulis pada SPSS 22, 2024

Berdasarkan tabel 3.18 maka hasil uji t dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Di dalam uji t dapat diketahui t-hitung variabel pengetahuan wajib pajak lebih besar dari t-tabel $3,905 > 1,985$ dan mempunyai nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial (individual) variabel pengetahuan wajib pajak (X1) berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Hal ini berarti bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang ada pada studi kasus Samsat Serpong.
2. Di dalam uji t dapat diketahui t-hitung variabel akuntabilitas pelayanan lebih kecil dari t-tabel $1,069 < 1,985$ dan nilai signifikansi $0,288 > 0,05$. Hal ini berarti bahwa akuntabilitas

pelayanan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada studi kasus Samsat Serpong.

3. Di dalam uji t dapat diketahui t_{hitung} variabel sanksi pajak lebih kecil dari t_{tabel} $1,018 < 1,985$ dan nilai signifikansi $0,311 > 0,05$. Hal ini berarti bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada studi kasus Samsat Serpong.

3.3 Pembahasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak (X1), akuntabilitas pelayanan (X2), dan sanksi pajak (X3) terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) yang terdaftar di Samsat Serpong. Berdasarkan hasil analisis data maka hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan mendapatkan hasil terkait dengan variabel pengetahuan wajib pajak (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) yang terdapat di Samsat Serpong, bila dilihat dari hasil t_{hitung} menunjukkan nilai 3,905 sedangkan untuk nilai t_{tabel} menunjukkan 1,985 yang menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih besar dibandingkan t_{tabel} yaitu $3,905 > 1,985$ dengan nilai signifikan 000 lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) pada wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Serpong.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Maharani & Adiputra (2023:524) yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Malau et al., (2021:557) yang menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Terdapat juga penelitian yang telah dilakukan oleh Karlina,dkk. (2020:152) yang menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak yang dimiliki memiliki peran yang sangat penting bagi setiap wajib pajak kendaraan bermotor yang terdapat di samsat Serpong untuk membayarkan kewajiban pajak yang dimiliki.

Maka dapat disimpulkan dari hasil yang sudah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada studi kasus Samsat Serpong. Sehingga penelitian yang sudah ada memiliki hasil yang sejalan dengan penulis.

2. Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan mendapatkan hasil terkait dengan variabel akuntabilitas pelayanan (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) yang terdapat di Samsat Serpong, bila dilihat dari hasil t_{hitung} menunjukkan nilai 1,609 sedangkan nilai t_{tabel} menunjukkan nilai 1,985 yang menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih kecil dibandingkan t_{tabel} yaitu $1,609 < 1,985$ dengan nilai signifikan 0,288 lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pelayanan (X2) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) pada wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Serpong.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis maka hasilnya sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2018:25) menyatakan bahwa akuntabilitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak., hal ini juga sejalan

dengan penelitian yang dilakukan oleh Santoso,dkk. (2020:112). Tidak adanya pengaruh signifikan antara variabel akuntabilitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada studi kasus samsat Serpong, dikarenakan petugas yang ada mungkin kurang ramah dan disiplin pada saat melayani para wajib pajak yang datang. Dengan begitu banyak para wajib pajak yang merasa kurang puas terhadap pelayanan yang diberikan, sehingga dampaknya membuat para wajib pajak tidak membayarkannya di samsat Serpong. Para wajib pajak lebih memilih membayarkannya ke tempat lain yang memberikan pelayanan lebih memuaskan.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah saya lakukan dengan terjun langsung ke lapangan saat penyebaran kuesioner maka hasil penelitian saya menunjukkan bahwa akuntabilitas pelayanan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, bila didalam hipotesis mengatakan berpengaruh maka hasil penelitian yang ada tidak harus sesuai karena hipotesis hanyalah dugaan sementara yang perlu diuji kebenarannya dengan menggunakan uji t dan juga uji f setelah selesai melakukan penyebaran kuesioner. Sehingga dapat disimpulkan dalam penelitian ini tidak berpengaruh secara parsial, karena setelah dilakukan pengujian melalui SPSS 22 terkait uji t menunjukkan hasil bahwa nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$. Penyebabnya karena wajib pajak mengisi kuesioner dengan skala 1-4, tidak ada pilihan netral sehingga wajib pajak mengisi dengan seadanya dan tidak menjawab dengan jujur. Akuntabilitas pelayanan akan berpengaruh apabila sampel penelitian yang saya gunakan lebih banyak lagi.

3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan mendapatkan hasil terkait dengan variabel sanksi (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) yang terdapat di Samsat Serpong, bila dilihat dari hasil t_{hitung} menunjukkan nilai 1,018 sedangkan untuk nilai t_{tabel} nya yaitu 1,985 yang menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih kecil dibandingkan t_{tabel} yaitu $1,018 < 1,985$ dengan nilai signifikan 0,311 lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pelayanan (X2) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) pada wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Serpong.

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Karlina,dkk. (2020:152) dan Rizal (2019:88) menyatakan bahwa sanksi pajak kendaraan bermotor tidak pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan apabila sanksi pajak dapat dipahami dan dimengerti oleh masing-masing wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal membayarkan kewajiban perpajakan yang dimiliki. Namun hal tersebut dibantah oleh penulis dengan hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini, karena variabel tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada studi kasus Samsat Serpong.

Sanksi pajak memberikan kesan bahwa pajak merupakan hal wajib bagi seluruh wajib pajak, maka dari itu sanksi pajak harus diberikan dengan tegas supaya memberikan efek yang jera kepada pelanggar atau kepada wajib pajak yang terlambat membayar pajaknya. Dengan dibuatnya sanksi pajak merupakan salah satu cara untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian yang sudah saya lakukan menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, hal ini dapat disebabkan masih banyak kecurangan atas penerimaan pajak yang ada, selain itu sanksi yang diberikan atas pelanggaran yang dilakukan tidak menimbulkan efek jera kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam aturan lalu lintas dan pembayaran pajak dengan tepat waktu. Begitu juga dengan sebaliknya sanksi akan berpengaruh secara parsial apabila hukuman yang diberikan kepada yang melanggar dilakukan secara adil, pasti wajib pajak akan membayar kewajiban perpajakan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

KESIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak Indonesia. Dengan menggunakan studi kasus wajib pajak yang terdaftar di Samsat Serpong, penulis meneliti dan membahas temuan dari analisis statistik dan pengujian mengenai dampak pengetahuan wajib pajak, akuntabilitas pelayanan, dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang telah dijelaskan sebelumnya, adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengujian terkait kepatuhan wajib pajak (Y) dimana wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Serpong dipengaruhi oleh hasil pengujian variabel pengetahuan wajib pajak (X1).
2. Berdasarkan hasil pengujian untuk variabel akuntabilitas pelayanan (X2) menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) pada wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Serpong.
3. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa tidak ada dampak parsial variabel sanksi pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) bagi wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Serpong.

Keterbatasan Peneliti

Terdapat sejumlah keterbatasan implementasi dalam penelitian ini yang memiliki dampak signifikan pada keseluruhan temuan penelitian. Berikut ini adalah keterbatasan penelitian:

1. Dalam penelitian ini, subjek penelitian hanya wajib pajak yang terdaftar dan berada di Samsat Serpong dengan jumlah populasi 100 responden, sehingga dirasa masih belum cukup untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
2. Pada saat proses pengumpulan data, jawaban yang diberikan oleh responden tidak secara akurat mencerminkan pendapat mereka. Dimana untuk peneliti berikutnya diperlukan penjelasan terkait dengan beberapa pernyataan yang ada pada kuesioner sehingga para responden bisa menjawab dengan kejujuran dalam berpendapat.
3. Penelitian ini hanya menggunakan 3 (tiga) variabel independen yaitu pengetahuan wajib pajak, akuntabilitas pelayanan, dan sanksi pajak yang berpengaruh terhadap satu variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga masih terdapat beberapa faktor lain yang timbul diluar variabel yang digunakan untuk penelitian selanjutnya.

Saran

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan maupun kesimpulan. Masih terdapat banyak kekurangan serta keterbatasan dalam penelitian yang dilakukan, sehingga peneliti akan memberikan saran supaya penelitian selanjutnya mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik lagi, adapun saran dari peneliti sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambah atau mengambil banyak sampel sehingga dapat mewakili jumlah populasi yang ada dan juga diharapkan dapat menambah variabel didalam penelitiannya untuk mengetahui apa saja faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Bagi petugas pajak, disarankan untuk meningkatkan sosialisasi mengenai pengetahuan wajib pajak, akuntabilitas pelayanan, dan sanksi pajak kepada masyarakat supaya dapat menjelaskan dengan baik dan benar kepada wajib pajak yang ingin membayarkan pajak kendaraan bermotornya di samsat terdekat.
3. Bagi wajib pajak, disarankan untuk mengetahui terkait dengan perpajakan yang ada dan juga sanksi pajak sebelum membeli kendaraan bermotor yang akan digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arum, H. P. (2012). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 1, 1–8. <http://eprints.undip.ac.id/35890/1/Skripsi.Arumpdf>
- Aswati, W. O., Mas'ud, A., & Nudi, T. N. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi kasus *Jurnal Akuntansi Dan ...*, III, 27–39. http://karyailmiah.uho.ac.id/karya_ilmiah/Arifuddin/14.pengaruh_kesadaran_wajib_pajak.pdf
- Carolina, V. (2018). *Pengetahuan Perpajakan*. Salemba Empat.
- Ekonomi, J. J., Kota, D., Penuh, S., & Ernita, D. (2023). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Pengetahuan Pajak Dan Kualitas Layanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kedaraan Bermotor*. 9(3), 916–929.
- Ghozali, I. (2018). “Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Pogram IBM SPSS” Edisi Sembilan. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hidayat, I., & Maulana, L. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang. *Bongaya Journal for Research in Accounting (BJRA)*, 5(1), 11–35. <https://doi.org/10.37888/bjra.v5i1.322>
- Ketut Kristina, dkk. (2023). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Sistem Samsat *Drive Thru* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat di Kabupaten Buleleng. *Jurnal JIMAT Univ. Pendidikan Ganesha*
- Karlina, Utami widya dan Ethika, M. H. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 15. <https://jkaa.bunghatta.ac.id/index.php/JKAA/article/view/30/24>
- Lulu Amalia Nusron, Vidya Vitta Adhivinna, & Vitya Risti Andari. (2023). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. In *Jurnal Fairness* (Vol. 13, Issue 3, pp. 1–11). <https://doi.org/10.33369/fairness.v13i3.31890>
- Mahaputri, N. N. T., & Noviari, N. (2016). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17(3), 2321–2351.
- Malau, Y. N., Gaol, T. L., Giawa, E. N., & Juwita, C. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(2), 551. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i2.414>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Edisi terb).
- Masita, N. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Biaya Kepatuhan, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Tingkat Kepercayaan Terhadap Sistem Pemerintah Dan Hukum, Dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen (JSAM)*, 1(3), 50–101. [file:///C:/Users/asus/Downloads/60-Article Text-193-1-10-20190415.pdf](file:///C:/Users/asus/Downloads/60-Article%20Text-193-1-10-20190415.pdf)
- Maulana, M. D., & Septiani, D. (2022). Pengaruh Layanan Samsat Keliling, E-Samsat dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 14(2), 231–246.

- Pengetahuan, P., Pajak, W., Pajak, S., & Sistem, D. A. N. (2023). Bermotor Pada Knator Samsat di Kabupaten Buleleng Ketut Kristina Puan Maharani 1 *, I Made Pradana Adiputra 2.
- Pengetahuan, P., Terhadap, S. E., Wajib, K., Kasus, S., Kantor, P., Subang, S., & Winasari, A. (2020). *Kendaraan Bermotor di Kabupaten Subang . 01*, 11–19.
- Puteri, P. O., Syofyan, E., & Mulyani, E. (2019). Analisis Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1569–1588. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.163>
- Rizal, A. S. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 76-90.
- Rohmah, D. N. (2018). Pengaruh Norma Subjektif, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kabupaten Pematang. *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 10(2), 168–185. <https://doi.org/10.24905/permana.v10i2.80>
- Sains, J. (2019). *Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (Vol. 1, No. 1: Pebruari, 2019)*. 1(1), 142–179.
- Santoso, A. P., Nurhayati, N., & Nurhayati. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan Publik, KesadaranWajib Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadapKepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor(Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten BandungBarat). *Prosiding Akuntansi*, 6(1), 108–112.
- Siregar, D. L. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Kendaraan Bermotor di Kota Batam. *Jurnal Akuntansi Barelang*, 2. <https://forum.upbatam.ac.id/index.php/jab/article/view/465>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian dan pengembangan (research and development/R&D)* (Cetakan ke). Bandung : Alfabeta 2019.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Cetakan Ke). Bandung: Alfabeta, 2021.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif* (Cetakan ke). Bandung : Alfabeta, 2022.
- Suryani & Julian, MH. , Bisnis, E., Akuntansi, P. S., Pamulang, U., & Tangerang, K. (2022). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Sosialisasi Pajak Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Kantor SAMSAT Kota Jakarta Utara)*. 1(2), 35–44.
- Wardani, D. K., & Rumiayatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Winasari, A. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, dan Sitem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Subang .*Jurnal Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 11–19.
- Wulandari, L. N., & Sanulika, A. (2024). Pengaruh Diskriminasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak Pada Kpp Pratama Serpong. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 1(1), 72–91. <https://doi.org/10.62237/jna.v1i1.6>